

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020

Siti Hajar Asmawiah¹, Hary Sulistiyo²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: sh.asma13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan APBN Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dimana cara dan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menilai data-data historis. Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal artinya semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh maka semakin meningkat juga Belanja Modal yang akan dilakukan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal*

Abstract

The study aimed to examine the influence of the region's native income on capital expenditures. The data source used in this study is secondary data through the official website of the Central Statistics Agency of West Java Province. This research uses samples in the form of West Java State Budget reports. Data collection techniques are documentation where the ways and techniques of data collection by looking at or assessing historical data. The analysis method in research uses simple linear regression analysis and hypothesis tests. The results of the study showed that regional native income has a positive effect on capital expenditure, meaning that the higher the regional income obtained, the more increased capital expenditure will be carried out.

Keywords : *Regional Original Income, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. (Permatasari & Mildawati, 2018)

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat

meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD. (Priatna & Purwadinata, 2019)

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat. (Utary, 2021)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari pengelolaan potensi di daerahnya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari hasil pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah akan tetapi pemerintah daerah memiliki sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Dampak dari perbedaan ini adalah terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antar daerah dimana daerah yang kaya akan potensi dan sumber daya memiliki sumber pendanaan yang lebih besar dibanding daerah yang miskin akan potensi daerahnya. (Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Erpita (2019), Utary (2021), Permatasari & Mildawati (2016), Priatna & Purwadinata (2019), dan Widajantie (2021), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Jaeni & Rohardian (2022), Waskito dkk (2019), dan Eksandy dkk (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Dengan terdapat perbedaan hasil penelitian dengan variabel yang sama menarik peneliti untuk melakukan pengujian ulang pada pendapatan asli daerah dan belanja modal.

Tujuan Penelitian ini agar mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020”

Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Sumber Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi . Dana perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain PAD yang sah
Adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/ krisis solvability. merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat adalah bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. set tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan.

Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja

modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian yang dikembangkan maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif verifikatif yaitu hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang menekankan pada analisis data numerik (digital).

Jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain dan merupakan data yang dipublikasikan kepada umum melalui lembaga resmi yang telah ditentukan, bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menilai data-data historis, yaitu berupa laporan keuangan yang diunduh melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu variabel independen dan satu variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, atau yang menjadi penyebab dari adanya suatu variabel dependen (terikat), dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Metode analisis data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Pentingnya metode analisis data yaitu untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat dengan penentuannya berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Menggunakan Uji Normalitas yang dimaa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam memprediksi apakah adanya pengaruh dari satu variabel bebas ataupun lebih terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan dapat menggunakan analisis regresi sederhana. Rumus analisis regresi sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan

a = Kostanta

b = Koefisien arah persamaan penelitian

X = Penghindaran Pajak

e = Error

Pengajuan hipotesis perlu dilakukan dalam penelitian ilmiah, terutama penelitian kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk menunjukkan apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan penelitian. Pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Uji T. Uji statistik t pada dasarnya untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel Independen (X) terhadap varaiabel dependen (Y) yang diuji pada tingkat signifikasi level 0,5 ($\alpha=5\%$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 1 Hasil statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
BM	27	5.1837E 2	392.51547
PAD	27	9.3793E 2	893.24370
Valid N (listwise)	27		

Tabel di atas merupakan hasil uji statistik deskriptif, hasil tersebut menunjukkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 27.

Pada hasil Descriptive Statistics di atas menunjukkan nilai rata-rata pada Belanja Modal (BM) ialah sebesar 5,1837 dengan standar deviasi sebesar 392,51547. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata bisa dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Pada hasil Descriptive Statistics di atas menunjukkan nilai rata-rata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sebesar 5,1837 dengan standar deviasi sebesar 392,51547. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata bisa dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		27
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.21605535E 2
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.188
	Negative	-.183
Kolmogorov-Smirnov Z		.979
Asymp. Sig. (2-tailed)		.293

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS 16, data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya ialah data yang diuji berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,293 > signifikan 0,05.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui apakah satu atau lebih variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dapat digunakan analisis regresi secara parsial atau simultan. Dibawah ni adalah rumus untuk regresi linier sederhana:

$$\text{Tobin's } Q = a + b\text{PAD} + e$$

**Tabel 3 Hasil analisis regresi linear berganda
 Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	282.084	92.442		3.051	.005
	PAD	.252	.072	.573	3.499	.002

a. Dependent Variable: BM

Sumber: SPSS 16, data diolah peneliti (2022)

Hasil persamaan analisis regresi linear sederhana pada tabel di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 282,084 + 0,252X$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan apabila Pendapatan Asli Daerah (X) konstan, maka akan dapat menaikkan variabel Belanja Daerah (Y) sebesar (282,084). Sedangkan koefisien regresi variabel X menunjukkan hasil yang positif, artinya variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dengan koefisien sebesar (0,252). Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat maka belanja modal akan meningkat.

Koefisien Determinasi

Kegunaan dari koefisien determinasi ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel dependen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen

**Tabel 4 Hasil koefisien determinasi
 Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.329	.302	327.97458	2.391

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: SPSS 16, data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas, hasil menunjukkan bahwa nilai dari R Square adalah 0.329, ini mengartikan bahwa variabel tak terikat pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh sebesar 32,9% sedangkan sisanya yaitu 67,1% dipengaruhi oleh variabel lain

Uji T

**Tabel 5 Hasil uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	282.084	92.442		3.051	.005
	PAD	.252	.072	.573	3.499	.149

a. Dependent Variable: BM

Sumber: SPSS 16, data diolah peneliti (2022)

Dari hasil uji pada tabel diatas, didapatkan hasil sebagai bernilai t hitung sebesar 3,499. Untuk mengetahui t tabel dapat dicari dengan rumus $df = n - k$ dengan taraf (α) = 0,05 dimana:

$$df = n - k$$

$$df = 27 - 3$$

$$df = 24$$

Maka diperoleh t tabel sebesar 1,708. Dengan demikian t hitung $3,499 > t$ tabel 1,708 dan nilai signifikansi $0,149 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh pada belanja modal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dari pembahasan diatas yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal artinya semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh maka semakin meningkat juga Belanja Modal yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Journal Management sistem*, 85-94.
- Hasibuan, N. F., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 127-140.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 62-74.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudera Ekonomika*, 74-83.
- Rohandian, P., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa. *Jurnal Ilmiah MEA*, 236-258.
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 450-465.
- Utary, V. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *JAMMI*, 80-96.

- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana ALokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Riviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 220-238.
- Widajantie, T. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 31-40.